



Menuju Jateng Satu

H-133



Bersatu Wujudkan Pilkada Damai

Panwaslu Giatkan Jagongan Pemilu

SEMARANG - Wartawan dari berbagai media baik cetak maupun elektronik di Jawa Tengah menggelar deklarasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) damai, di Vina House, Jalan Diponegoro 29, Gajahmungkur, Selasa (13/2).

Dalam kegiatan yang bertajuk Bersatu Wujudkan Pilkada Damai, ratusan wartawan yang hadir tersebut bertekad akan mendukung penuh pilkada serentak yang aman, damai, dan kondusif tanpa gesekan serta gangguan apapun. Secara serentak, mereka disaksikan Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono, Wakapolda Jateng Brigjen Indrajit, sejumlah pejabat utama di Polda Jateng serta kepala biro dan pimpinan redaksi media cetak dan elektronik termasuk Pemimpin Redaksi *Suara Merdeka* Gunawan Permadi, membacakan ikrar sebagai bentuk komitmen.

Damar Sinuko, perwakilan dari wartawan mengatakan, dia dan seluruh wartawan yang ada di Jawa Tengah sepakat akan menciptakan suasana damai dari awal pilkada hingga akhir, dengan cara memberikan pemberitaan kepada masyarakat yang menyejukan, sesuai fakta, tanpa tendensi apapun yang dapat menimbulkan gesekan dan perpecahan.

"Kami akan terus memberikan pemberitaan yang menyejukan untuk menangkal perpecahan. Sebenarnya tanpa deklarasi ini kami tetap akan memberikan pemberitaan seputar pilkada sesuai fakta, tanpa berpihak kepada salah satu pasangan calon," ungkapnya.

Namun, lanjut Damar, dengan

adanya deklarasi tersebut dia dan rekan lainnya semakin mantap untuk terus memberikan pemberitaan yang sejuk hingga membuat pembaca atau pemirsa mendapat informasi yang diinginkan tanpa menimbulkan perpecahan.

Kode Etik

"Selama ini Jawa Tengah adem

ayem. Untuk itu kami akan terus menjaga jangan sampai ada perpecahan setelah pilkada dengan pemberitaan yang menyejukan hati," jelasnya.

Dengan begitu, persaudaraan akan tetap terjalin dan setelah pesta demokrasi tersebut digelar situasi kembali seperti semula, aman, dan tenteram serta saling merangkul.

Sementara itu Pemimpin Redaksi *Wawasan Aulia* Muhammad mengatakan, sepanjang wartawan melaksanakan tugas dengan kode etik, maka tidak akan ada pelanggaran kerja. Sebab, wartawan dibekali dengan jurnalisme damai dan deklarasi merupakan pembulatan tekad.

Pengamat komunikasi dari Undip

Triyono Lukmantoro mengatakan, terkait pemberitaan pilkada, media harus memuat keberadaan dua belah pihak atau tidak hanya satu pasangan calon. Media juga tidak boleh menyindir atau menjatuhkan salah satu lawan politik.

"Kampanye itu mengajak, persuasi, jadi berita konflik itu biasa. Namun titik mana yang menunjukkan konflik, titik mana yang menunjukkan perbedaan dua pihak itu harus jelas. Masyarakat sekarang itu pintar, jika media memihak, pasti ditinggalkan," ujarnya.

Sementara itu Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono menegaskan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung kegiatan deklarasi tersebut. Sebab, media memiliki peran pen-

ting dalam mendinginkan suasana pilkada.

"Dalam kontestasi pilkada, media merupakan tempat strategis bagi setiap pasangan calon sebagai panggung. Saya hanya memohon berita yang menyejukan sehingga bisa saling menjaga kesatuan persatuan dalam pilkada nanti," jelasnya.

Politik Uang

Terpisah, Panwaslu Kabupaten Semarang hendak menggiatkan Program Jagongan Pemilu. Melalui program itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto optimistis pengawasan praktik politik uang di lapangan akan lebih efektif.

"Akan digelar hingga tingkat kecamatan bahkan desa/kelurahan. Sifatnya obrolan untuk sosialisasi terkait regulasi pemilu, khususnya potensi pelanggaran politik uang dan politisasi SARA," kata Agus, Selasa (13/2).

Disamping Jagongan Pemilu, dia bersama komisioner Panwaslu Kabupaten Semarang serta jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan saat ini juga masih aktif melakukan sosialisasi ke semua elemen masyarakat. Karena sesuai amanat Undang-undang, Panwaslu mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan politik uang berkedok apapun, termasuk berkedok kegiatan keagamaan serta bentuk lainnya.

"Potensi politik uang kami garis bawahi sebagai sesuatu yang menjadi konsen Panwaslu," tegasnya.

Persoalan politik uang, lanjutnya, belum lama ini sudah didiskusikan melibatkan partai politik di Kabupaten Semarang. Hal ini bisa terjadi karena ada unsur yang memberi dan yang menerima. (K44,H86-67)

